SI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

SKRIPSI

ASPEK AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN PADA PERJANJIAN *LEASING* YANG TERMINASI

(STUDI KASUS PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG SEKAYU)

Oleh :
SELLY ANGGRAYNI
NIM. 01053130006

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2009

97

S
346.047 07
Ang
a
c-090792
2009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

ASPEK AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN PADA PERJANJIAN *LEASING* YANG TERMINASI

(STUDI KASUS PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG SEKAYU)

Oleh :
SELLY ANGGRAYNI
NIM. 01053130006

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA	: SELLY ANGGRAYNI
NIM	: 01053130006
JURUSAN	: AKUNTANSI
MATA KULIAH	: AKUNTANSI KEUANGAN
JUDUL SKRIPSI	: ASPEK AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN PERJANJIAN *LEASING* YANG TERMINASI (STUDI KASUS PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG SEKAYU)

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 11 Mei 2009 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, Mei 2009

Ketua,	Anggota,	Anggota,
H. Aspahani, SE, MM, Ak	Ahmad Subeki, SE, MM, Ak	Hj. Rochmawati Daud, SE, MM, Ak
NIP. 132000093	NIP. 132133708	NIP. 132105607

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak
NIP. 131801649

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: SELLY ANGGRAYNI
NIM	: 01053130006
JURUSAN	: AKUNTANSI
MATA KULIAH	: AKUNTANSI KEUANGAN
JUDUL SKRIPSI	: ASPEK AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN PADA PERJANJIAN *LEASING* YANG TERMINASI (STUDI KASUS PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG SEKAYU)

PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN	DOSEN PEMBIMBING
	Ketua :
	H. ASPAHANI, SE, MM, Ak
	NIP. 132000093
	Anggota :
	AHMAD SUBEKI, SE, MM, Ak
	NIP. 132133708

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Untuk mencapai sesuatu yang diharapkan
diperlukan adanya suatu pengorbanan
Agar ia tidak hanya menjadi suatu impian."

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."
(QS. Ar-Ra'd: 11)

Kupersembahkan kepada :

- *Allah S.W.T atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya*
- *Orang tua tercinta*
- *Saudara-saudara tersayang*
- *Teman-temanku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur tidak lupa penulis panjatkan atas kehadirat Allah S.W.T atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini mengambil judul **Aspek Akuntansi dan Perpajakan Pada Perjanjian *Leasing* yang Terminasi (Studi Kasus Pada PT. Federal International Finance Cabang Sekayu)**. Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Gambaran Umum Perusahaan, Bab IV Analisis dan Pembahasan, Bab V Kesimpulan dan Saran.

Data utama yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari perusahaan yang berada di Jalan Wahid Udin Lingkungan I No.149 Kelurahan Serasan Jaya Sekayu. Hasil penelitian menunjukan bahwa selain terjadi kasus terminasi yang dikarenakan oleh sebab ekonomis pada PT. Federal International Finance juga banyak mengalami kasus terminasi yang disebabkan oleh *default*. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadimya kasus terminasi yang disebabkan oleh *default*, perusahaan perlu melakukan tindakan tegas terhadap para kredit analis untuk menghindari banyaknya piutang tak tertagih.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan manajemen perusahaan dan bahan masukan akademisi bagi penelitian akuntasi keuangan.

Penulis,

Selly Anggrayni

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Aspek Akuntansi dan Perpajakan Pada Perjanjian *Leasing* yang Terminasi (Studi Kasus Pada PT. Federal International Finance Cabang Sekayu)", sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Hj. Badia Parizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. H. Syamsurijal AK, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. H. Harun Delamat, M.Si, Ak, Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
4. Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. H. Aspahani, SE, MM, Ak, Ketua Pembimbing Skripsi.
6. Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, Anggota Pembimbing Skripsi.
7. Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak, Pembimbing Akademik.
8. Kedua orang tuaku yang telah memberikan segala perhatian, dukungan, serta do'anya selama ini.
9. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
10. Pimpinan dan staf karyawan PT. Federal International Finance cabang Sekayu.
11. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
12. Saudara-saudaraku, Fadli, Rosdalina, Gunawan, dan Bella atas semua yang telah diberikan dan talah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-temanku, Tea, Pipin, Winda, dan Ephy yang telah menjadi sahabat terbaikku di Faluktas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
14. Erni, Ummi, Refisa, Dayat dan seluruh anak Akuntansi '05 Universitas Sriwijaya.
15. Puput, Icha, Siski dan Iin untuk semangat, dorongan, dan bantuannya.

Semoga Allah S.W.T membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua, Amin.

Penulis,

Selly Anggrayni

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 090792
TANGGAL: 16 JUN 2009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SKRIPSI iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR TABEL x
ABSTRAKSI xi
ABSTRACT xii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.5 Kerangka Pemikiran 5
1.6 Metodologi Penelitian 8
1.6.1 Objek Penelitian 8
1.6.2 Metode Pengumpulan Data 8
1.6.3 Teknik Analisis 9
1.6.4 Sistematika Skripsi 10

BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Sewa Guna Usaha 12
2.2 Jenis-jenis dan Klasifikasi Sewa Guna Usaha 14
2.3 Kriteria Pengelompokkan Transaksi Sewa Guna Usaha 19
2.4 Keuntungan dan Kerugian *Leasing* 24
2.5 Akuntansi Sewa Guna Usaha 26
2.5.1 Akuntansi untuk Sewa Guna Usaha_*Lessee* 26
2.5.2 Akuntansi untuk Sewa Guna Usaha_*Lessor* 26

2.6 Perlakuan Akuntansi, Pelaporan dan Pegungkapan Transaksi Sewa Guna Usaha 30
2.6.1 Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha Bagi *Lessor* Menurut PSAK No. 30 30
2.6.2 Pelaporan dan Pengungkapan Transaksi Sewa Guna Usaha oleh *Lessor* Menurut PSAK No. 30 33

2.7 Sewa Guna Usaha Menurut Perpajakan 35
2.7.1 Jenis Sewa Guna Usaha 35
2.7.2 Perlakuan Pajak Penghasilan Pada Sewa Guna Usaha 36

2.8 Pajak Pertambahan Nilai Atas Sewa Guna Usaha 38

2.8.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 38
2.8.2 Karakteristik (Legal Characteristics) Pajak Pertambahan Nilai 39
2.8.3 Mekanisme Pengenaan PPN Penyerahan Barang Kena Pajak 41
2.8.4 Penerahan Barang Kena Pajak..... 42
2.8.5 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Sewa Guna Usaha..... 43

2.9 Keputusan–keputusan Menteri dan Surat-Surat Edaran Tentang *Leasing* 51
2.9.1 Perusahaan Pembiayaan 52

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
3.1 Sejarah Berdirinya PT. Federal International Finance 54
3.2 Bidang Usaha Perusahaan 57
3.3 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 58
3.3.1 Struktur Organisasi PT. Federal International Finance..... 58
3.3.2 Pembagian Tugas 61

3.4 Prosedur Pembiayaan 63

BAB IV ASPEK AKUNTANSI DAN PERPAJAKN PADA PERJANJIAN *LEASING* YANG TERMINASI
4.1 Analisa Pengklasifikasian Sewa Guna Usaha 76
4.2 Perlakuan Akuntansi Pada Perjanjian *Leasing* yang Terminasi.... 81
4.3 Aspek Perpajakan Pada Perjanjian *Leasing* yang Terminasi 90
4.3.1 Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Pada PT. Federal International Finance Selaku *Lessor* Dalam Perjanjian *Leasing* 90
4.3.2 Analisis Perlakuan PPN Pada PT. Federal International Finance Selaku *Lessor* Dalam Perjanjian *Leasing* 92

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan..... 101
5.2 Saran..... 103

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses terjadinya *Direct Financing Lease*.....22
Gambar 2.2 Klasifikasi *Leasing Lessor* 23
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Federal International Finance Sekayu Departemen Marketing 60
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Federal International Finance Sekayu Departemen Operational.....60

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kartu Piutang Atas Transaksi *Lease* PT. Jasa Marga.....69
Tabel 3.2 Kartu Piutang Atas Transaksi *Lease* Tuan Zainuddin.....72
Tabel 4.1 Daftar Pembayaran Piutang *Lease_PT. Jasa Marga*.....83
Tabel 4.2 Rekapitulasi Penanaman Bruto, Pendapatan yang Belum Diakui, dan Penanaman Netto.....87
Tabel 4.3 Daftar Pembayaran Piutang Lease_Tuan Zainuddin.....89
Tabel 4.4 Penghasilan PT. Federal International Finance yang Dikenakan PPh.....91

ABSTRAKSI

Perlakuan Akuntansi dan Perpajakan Pada Perjanjian *Leasing* Yang Terminasi (Studi Kasus Pada PT. Federal International Finance)

Penelitian ini dilakukan : (1). Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi yang diterapkan pada PT. Federal International Finance selaku *lessor* telah sesuai dengan perlakuan akuntansi menurut PSAK No. 30 jika terjadi terminasi dalam perjanjian *leasing* yang dikarenakan sebab ekonomis, (2). Untuk mengetahui apakah perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) oleh PT. Federal International Finance selaku *lessor* telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 Jo. SE-29/PJ.42/1992 tanggal 19 Desember 1992, (3). Untuk mengetahui apakah perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PT. Federal International Finance selaku *lessor* telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 Jo. SE-10/PJ.42/1994 tanggal 22 Maret 1994. penelitian dilakukan pada PT. Federal International Finance cabang Sekayu. Data yang digunakan dalam menganalisis permasalahan adalah data primer berupa aplikasi pembiayaan, data piutang usaha, bukti-bukti penerimaan kas. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang menganalisis serangkaian informasi berupa data-data atau keterangan yang didapat dari hasil penelitian dibandingkan dengan teori yang mendukung. Setelah penelitian dilakukan perlakuan akuntansi jika terjadi terminasi, perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Federal International Finance telah sesuai dengan standar yang berlaku. Selain terjadi terminasi yang dikarenakan oleh sebab ekonomis, pada PT. Federal International Finance juga terjadi terminasi yang dikarenakan oleh *default*, untuk menghindari terjadinya terminasi yang dikarenakan *default*, perusahaan harus mengambil tindakan yang tegas pada para kredit analis dalam menganalisis aplikasi pembiayaan untuk menghindari terjadinya piutang tak tertagih.

Kata kunci : Perjanjian *Leasing* yang terminasi, aspek akuntansi, aspek perpajakan.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

ABSTRACT

Accounting Aspect and taxation on term of terminated leasing (case study at PT. FIF Branch Office Sekayu)

The aim of this research are. (1). to know if the accounting treatment which has been implemented accordance with PSAK no. 30 if termination is happened on leasing agreement which is caused by economic factor, (2). to know if income tax (PPh) treatment which is implemented by PT. Federal International Finance has accordance with Decree of minister of financial No. 1169/KMK. 01/1991 on November 27th, 1991 Jo. SE 29/PJ.42/1992, (3). To know if value added tax (PPN) which is Implemented by PT. Federal International Finance has accordance with Decree of Financial Minister No. 1169/KMK. 01/ 1991 on November 27th, 1991 Jo SE 10/PJ.42/1994 on March 22nd, 1994. This research is done in PT. Federal International Finance branch office Sekayu, the data for this research are leasing application, receiveable account list, and cash invoices. All of data is analyzed by using descriptive analysis technique, by comparing the result of this research and the supporting theory of the research. After the research is completed, there are indication that accounting treatment, Income tax and value added tax has been implemented accordance with general accepted standard. Beside there is term of terminated leasing which is caused by economic factor, in PT. Federal International Finance also there is termination which is caused by default, to avoid the default, the company should applied decision assertively to credit analysis in analyzing leasing application to avoid uncollectible account receivable.

Keywords: *term of terminated leasing, accounting treatment aspect, taxation treatment aspect.*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat pada saat ini menuntut setiap badan usaha yang bergerak dalam sektor perekonomian untuk dapat mengantisipasi semua perubahan yang banyak terjadi. Dan salah satu kendala yang biasanya terjadi pada saat perusahaan yang akan melakukan pengembangan usahanya adalah saat perusahaan tersebut memerlukan tambahan investasi baru. Misalnya dalam pengadaan barang-barang modal.

Pengadaan barang-barang modal perusahaan ini tentunya membutuhkan dana yang relatif besar. Jarang ada perusahaan yang langsung menyediakan dana dari dalam perusahaan sendiri untuk mendapatkan barang-barang modal tersebut. Dan untuk menyediakan barang-barang modal yang dibutuhkan, perusahaan mempunyai beberapa alternatif pilihan yang biasa digunakan, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Membeli dengan dana yang tersedia (modal sendiri).
2. Membeli dengan fasilitas kredit bank.
3. Membiayai dengan cara *leasing*.

Untuk pembiayaan dengan dana sendiri seringkali terbentur pada masalah keterbatasan dana perusahaan yang tersedia. Demikian pula apabila perusahaan menggunakan fasilitas kredit dari bank dimana perusahaan biasanya terbentur pada prosedur yang rumit dari pihak perbankan dan juga adanya pembatasan jumlah kredit yang diperoleh, yang biasanya dikenal dengan sebutan 3L yaitu : *Legal, Limit,* dan *Lending.* Oleh karena itu, pembiayaan secara *leasing* merupakan alternatif yang sangat tepat dan menguntungkan bagi perusahaan.

Kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian No. Kep-122/MK/IV/2/1974, No. 32/MSK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari tentang Perizinan Usaha *Leasing*. Sejak saat itu dan khususnya sejak tahun 1980 jumlah perusahaan sewa guna usaha dan transaksi sewa guna usaha makin bertambah dan meningkat dari tahun ke tahun untuk membiayai penyediaan barang-barang modal dunia usaha.

Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Namun dalam perkembangannya, kegiatan *leasing* seringkali dihadapkan pada suatu permasalahan yang berkaitan dengan masalah tentang terminasi atau pemutusan terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya terminasi dalam transaksi *leasing*, yaitu :

1. *Force Majeur*

   Force majeur adalah terputusnya transaksi *leasing*, seperti misalnya karena kebakaran, bencana alam dan lain-lain.

2. *Default*

Default adalah terputusnya transaksi *leasing* karena *lessee* tidak dapat memenuhi pembayaran *lease payment* serta kewajiban lainnya sehingga kontrak *finance lease* berakhir lebih cepat.

3. Sebab ekonomis

Maksudnya adalah apabila *lessee* mengakhiri masa *lease* sebelum waktunya karena pertimbangan ekonomis semata dengan membayar sekaligus kewajiban yang tersisa.

Pada kenyataannya, dalam transaksi *lease* tidak semua berakhir dengan kesepakatan, jika terjadi terminasi atau pemutusan atas transaksi *leasing* maka *lessor* harus membukukan baik keuntungan maupun kerugian yang terjadi akibat adanya penjualan tersebut di muka.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang perusahaan pembiayaan, menyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank, dan Lembaga Keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahan pembiayaan adalah sebagai berikut : Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, dan Pembiayaan Konsumen.

PT. Federal International Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia. Pada PT. Federal International Finance juga mengalami kasus terminasi dimana yang paling sering terjadi adalah kasus terminasi yang dikarenakan oleh sebab ekonomis, kebanyakan para konsumen mengakhiri masa *lease* sebelum pada waktunya dengan cara membayar sekaligus kewajiban yang tersisa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis memilih judul skripsi yaitu :

"ASPEK AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN PADA PERJANJIAN *LEASING* YANG TERMINASI"

(STUDI KASUS PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG SEKAYU)

1.2. Perumusan Masalah

Perjanjian *lease* menjadi salah satu alternatif pembiayaan barang-barang modal yang tidak terlepas dari masalah terminasi atau pemutusan perjanjian *leasing* sehingga kontrak *leasing* menjadi lebih pendek dari masa *leasing* yang disepakati. Dari penelitian, diketahui bahwa beberapa tahun terakhir permintaan pembiayaan modal kerja melalui lembaga non-bank sangat meningkat pesat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba untuk merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perlakuan akuntansi yang diterapkan pada PT. Federal International Finance selaku *lessor* telah sesuai dengan perlakuan akuntansi menurut PSAK No. 30 jika terjadi terminasi dalam perjanjian *leasing* yang dikarenakan sebab ekonomis?
2. Apakah perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) oleh PT. Federal International Finance selaku *lessor* telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 Jo. SE-29/PJ.42/1992 tanggal 19 Desember 1992?
3. Apakah perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PT. Federal International Finance selaku *lessor* telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 Jo. SE-10/PJ.42/1994 tanggal 22 Maret 1994?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Federal International Finance
2. Mengetahui perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) pada PT. Federal International Finance
3. Mengetahui perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Federal International Finance

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat :

1) Bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan, yaitu memperkaya aspek aplikasi ilmu akuntansi pada pelaksanaan kegiatan suatu perusahaan.
2) Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai kegiatan sewa guna usaha baik ditinjau dari aspek akuntansi maupun dari aspek perpajakan.
3) Memberikan bahan informasi pendukung dan kepustakaan bagi mahasiswa lain akan membahas aspek yang sama.

I.5. Kerangka Pemikiran

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada perkembangan yang ada pada masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin ditingkatkan pula. Keadaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan menuntut kegiatan di bidang pembiayaan. Berbagai upaya dalam menghimpun dana masyarakat telah

dilakukan dalam penetapan kebijaksanaan pemerintah. Pada hakikatnya perluasan usaha membutuhkan pembiayaan dana dan peralatan modal. Dalam hal pembiayaan dana, selain melalui sistem perbankan dan pembiayaan non bank yang telah lama kita kenal, kita juga mengenal pembiayaan lainnya yaitu sistem bisnis "*leasing*".

Secara umum *leasing* artinya *equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak. Dalam Pasal I Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian No. Kep-122/MK/IV/2/1974, No. 32/MSK/2/1974 dan No. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari, menyebutkan bahwa *leasing* itu adalah :

> "Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama".

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang perusahaan pembiayaan, menyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank, dan Lembaga Keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahan pembiayaan adalah sebagai berikut : Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, dan Pembiayaan Konsumen.

Pada dasarnya *leasing* mempunyai dua macam tipe dasar yaitu : *operating lease* dan *capital/finance lease*. Perlakuan akuntansi terhadap kedua jenis *leasing* tersebut akan berbeda. Begitu juga ditinjau dari sudut perpajakan, perlakuan terhadap kedua jenis *leasing* tersebut juga tidak sama.

Pada *finance lease* dianggap telah terjadi pemindahan seluruh manfaat dan risiko barang modal, maka transaksi tersebut harus dianggap sebagai pembiayaan oleh *lessor*. Oleh karena itu, *lessor* tidak boleh mencatat pembayaran-pembayaran yang menjadi kewajiban *lessee* sebagai sewa dengan harga perolehan barang modal dicatat oleh *lessor* sebagai pendapatan yang belum diakui (*unearned lease income*). Setiap pembayaran *lease* berkala yang dilakukan oleh *lessee* dicatat oleh *lessor* sebagai pengurang piutang dan pembayaran beban bunga. Sebaliknya pada transaksi *operating lease* tidak terjadi pemindahan seluruh atau sebagian besar manfaat dan risiko atas barang modal tesebut, maka transaksi tersebut dipandang sebagai transaksi sewa-menyewa biasa. Dengan demikian, barang modal dicatat dan didepresiasikan oleh *lessor*. Sedangkan pembayaran berkala oleh *lessee* diakui *lessor* sebagai pendapatan sewa.

Dari segi ekonomis, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik dimana pemindahan sumber daya ini akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dapat dikelola dengan baik oleh perusahaan.

Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya serta interpretasi terhadap hasilnya. Jika dikaitkan dengan pemenuhan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akuntansi harus dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan.

Perjanjian *lease* menjadi salah satu alternatif pembiayaan barang-barang modal yang tidak terlepas dari masalah terminasi atau pemutusan perjanjian *leasing* sehingga kontrak *leasing* menjadi lebih pendek dari masa *leasing* yang disepakati.

Standar khusus akuntansi sewa guna usaha tercantum dalam Pernyataan Nomor 30 Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap kegiatan sewa guna usaha adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 Jo. SE-29/PJ.42/1992 tanggal 19 Desember 1992, dan dasar hukum yang digunakan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 Jo. SE-10/PJ.42/1994 tanggal 22 Maret 1994.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Objek Penelitian

Objek penelitian dilakukan pada PT. Federal International Finance cabang Sekayu beralamat di Jalan Wahid Udin Lingkungan 1 No 149 Kelurahan Serasan Jaya Sekayu selaku pihak *lessor* dalam perjanjian *leasing*.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah. Misalnya aplikasi pembiayaan, data piutang usaha, bukti-bukti penerimaan kas, dan lain-lain.

Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dengan membaca buku-buku, literatur-literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah, yang mana data sekunder ini akan digunakan sebagai landasan pemikiran pada data primer. Setelah mengetahui data primer dan data sekunder, peneliti baru dapat mengadakan analisis terhadap kasus yang terjadi.

Untuk mengetahui data-data yang relevan dan akurat dalam penelitian maka dilakukan dua tahap dalam penelitian yaitu :

a. Studi pustaka

   Studi pustaka dilakukan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan analisis kasus. Studi pustaka ini diperoleh dengan membaca literatur-literatur dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi lapangan

   Studi lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan yaitu perusahaan yang akan diteliti untuk mengamati keadaan perusahaan dan melakukan pengambilan data serta melakukan wawancara dengan pihak perusahaan. Data yang diperoleh dari studi lapangan ini merupakan data primer yaitu data yang akan dijadikan objek penelitian dengan membandingkan data primer dengan data sekunder.

1.6.3. Teknik Analisis

Dalam menganalisis data-data yang dikumpulkan penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang menganalisis serangkaian informasi berupa data-data atau keterangan yang didapatkan dari hasil penelitian dibandingkan dengan teori yang mendukung. Data yang terkumpul yang mencerminkan keadaan perusahaan sebenarnya akan dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), serta Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) dan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) beserta peraturan perpajakan lainnya seperti Keputusan Menteri Keuangan, dan Surat Edaran Dirjen Pajak. Selanjutnya akan diadakan analisis permasalahan dengan hasil penelitian langsung pada perusahaan.

1.6.4. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam pembuatan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka/landasan untuk menjawab masalah penelitian. Bagian ini memuat uraian mengenai pengertian sewa guna usaha, jenis-jenis dan klasifikasi sewa guna usaha, kriteria pengelompokan transaksi sewa guna usaha, keuntungan dan kerugian sewa guna usaha, akuntansi sewa guna usaha, perlakuan akuntansi, pelaporan dan pengungkapan sewa guna usaha, sewa guna usaha menurut perpajakan, pajak pertambahan nilai atas sewa guna usaha, keputusan-keputusan menteri dan surat-surat edaran tentang *leasing*, dan perusahaan pembiayaan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bagian ini memuat data penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Bagian ini mendeskripsikan objek penelitian mengenai sejarah berdirinya PT. Federal International Finance, bidang usaha perusahaan, struktur organisasi dan pembagian tugas, prosedur pembiayaan serta contoh transaksi *lease* yang ada pada PT. Federal International Finance.

BAB IV ASPEK AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN PADA PERJANJIAN *LEASING* YANG TERMINASI

Bagian ini membahas secara lengkap mengenai analisa pengklasifikasian sewa guna usaha, perlakuan akuntansi pada perjanjian *leasing* yang terminasi, dan aspek perpajakan pada perjanjian *leasing* yang terminasi.

BAB V KESIMPULAN & SARAN

Bagian ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan diajukan saran-saran sehingga nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk kemajuan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Harahaf, Sopyan Syafri. 1994. *Akuntansi Aktiva Tetap, Akuntansi Pajak, Revaluasi Leasing*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Keiso, Donald E & Jerry J. Weygandt. 1995. *Akuntansi Intermediate, Jilid 2*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tanggal 27 November 1991 Tentang "Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)".

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.42/1994 Tanggal 22 Maret 1994 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi yang Berakhir Menjadi Lebih Singkat dari Masa Sewa Guna Usaha yang disyaratkan dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.42/1992 Tanggal 19 Desember 1992 tentang Perlakuan Pajak Peghasilan (PPh) terhadap kegiatan sewa guna usaha.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian No. KEP-112/MK/IV/2/1974, No. 32/MSK/2/1974 dan No. 30/Kpb/I/1974 Tanggal 7 Pebruari 1974 tentang "Perizinan Usaha Leasing".

Stice, Earl K & Skousen, K. Fred. 2005. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Salemba Empat.

Sukarji, Untung. 2000. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tunggal, Amin Widjaya & Arif Djohan Tunggal. 2002. *Akuntansi Leasing*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-undang Perpajakan tahun 2000.

Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yusdianto, Prabowo. 2002. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.